

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang majemuk dengan semua sumberdaya manusia yang ada termasuk dengan kultur organisasi yang berada di dalamnya. Dalam hal ini untuk menyelaraskan atau mengatur semuanya perlu adanya suatu kebijakan yang bisa di terapkan dari mulai atas hingga kebawah.

Peraturan tingkat nasional yang hari ini ada dan diterapkan bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kesamaan pandangan bagi siapapun yang terlibat didalamnya. Negara Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan kebiasaan, budaya dan kultur yang berbeda, perlu aturan yang mengatur secara nasional untuk mengatasi masalah yang terjadi didaerah.

Pelaksanaan system ini secara umum memberikan dampak yang positif kepada semua pelaksana disetiap daerah, karena memberikan arah dan batasan yang jelas, selain itu pada aspek lain pelaksanaannya dapat membantu tujuan nasional. Kebijakan yang dibuat secara nasional merupakan hasil dari pengkajian yang menyeluruh sesuai dengan situasi dan kondisi seluruh masyarakat.

Salah satu kebijakan adalah keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang dibuat oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang merupakan oraganisasi tertinggi kepramukaan yang berada di Indonesia. Kwartir Nasional membuat sebuah peraturan yang bersekala nasional bertujuan untuk memberikan

keseragaman pemahaman dan kesamaan konsep untuk mencapai tujuan bersama di semua aspek yang berada di dalam garis hirarki kepramukaan. Salah satu organisasi yang merupakan pelaksana dari peraturan itu adalah Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah salah satu gerakan pramuka yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan yang menerapkan peraturan sekala nasional dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dimaksudkan agar terciptanya kelancaran, kenyamanan dan ketertiban dalam berorganisasi.

Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah salah satu Gerakan Pramuka dengan aktivitas yang cukup padat, baik itu aktivitas program kerja, pendidikan, administrasi maupun aktivitas lainnya. Salah satu yang cukup mendominasi adalah aktivitas program kerja dan pendidikan, yang secara khusus berkaitan dengan proses administrasi. Dengan sekala aktivitas yang begitu padat memerlukan penanganan yang serius seperti halnya sama dengan kegiatan setingkat kwartir.

Perkembangan kegiatan di Gerakan Pramukan UIN Sunan Gunung Djati Bandung bukan hanya terjadi di sekala program kerja yang terus bertambah secara jumlah namun juga masuk kedalam unit pengembangan yang berada didalamnya seperti Protokol, Lingkungan Seni Pramuka, Pers dan Komunikasi Pramuka, Dan Yang Terakhir Adalah *Search and Rescue* yang pada umumnya keperluan yang berada didalam unit pengembangan itu secara administrasi sama dengan kebutuhan administrasi yang sekalanya setingkat UKM/UKK yang ada di UIN Sunan Gunung

Djati Bandung. Pengelolaan administrasi di Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi sangat pesat dan banyak secara jumlah.

Keberadaan Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang semakin berkembang menuntut adanya kestabilan pengelolaan *system* administrasi satuan gerakan pramuka untuk mengatur dan mengawasi segala bentuk aktivitas yang dilakukan.

Peraturan mengenai petunjuk pelaksana administrasi satuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlunya keseragaman bentuk dalam pengelolaan untuk tercapainya visi dan misi gerakan pramuka yang akan dinilai dalam bentuk akreditasi pramuka. Dengan adanya peraturan tersebut Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu untuk menempatkan administrasi sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi.

Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sudah berumur 39 tahun dituntut untuk bisa melakukan dan terdaftar sebagai pramuka terakreditasi bersaing dengan pramuka yang lain termasuk pramuka yang berada di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Merujuk kepada Peraturan Pramuka No 041 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Pelaksana Administrasi Satuan Pramuka. Dalam PP No 041 tahun 1995 dijelaskan mengenai dokumen-dokumen yang harus ada dan tersimpan dengan baik untuk setiap organisasi pramuka mulai dari pencatatan, laporan, buku pribadi, catatan sarana pendukung.

Implementasi Peraturan Pramuka No 041 Tahun 1995 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini terkait dengan pengelolaan acuan administrasi yang beragam yang ada di kampus. Dalam hal ini organisasi pramuka secara garis struktural kampus harus mengikuti kebijakan kampus, namun secara struktural organisasi kepramukaan harus mengikuti aturan secara nasional kepramukaan.

Temuan lain dilapangan masih banyak kegiatan yang belum tercatat dan dilaporkan secara jelas ke Kwartir Cabang, pendataan dan pencatatan barang-barang masih belum berjalan dan ditambah dengan jumlah aktivitas kegiatan yang begitu banyak tidak berbanding lurus dengan pengawasan dilakukan, dalam hal ini Pembina yang menjadi unsur pengawas dan birokrasi kampus menjadi unsur pembimbing. Pengawasan menjadi faktor penting guna tercapainya proses implementasi kebijakan. Pengawasan wajib dilakukan agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan temuan awal tersebut, maka penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut yang diformulasikan dalam judul Skripsi IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PETUNJUK PELAKSANA ADMINISTRASI SATUAN PRAMUKA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan identifikasi masalah yang dianggap menarik untuk diteliti, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Kwartir Nasional Pramuka No 041 Tahun 1995 di Pramuka UIN Sunan Gunung Djati

Bandung mengenai pencatatan, laporan, buku pribadi dan catatan sarana pendukung

2. Kurang optimalisasi pengawasan dari pihak terkait sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Kwartir Nasional Pramuka No 041 Tahun 1995 di Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka dalam menangani pengadministrasian di Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka di Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka dalam menangani pengadministrasian di Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka di Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka yang mengacu pada Kebijakan Kwartir Nasional

Gerakan Pramuka No 041 Tahun 1995 ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teoritis maupun praktis, yaitu:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan administrasi publik khususnya konsentrasi kebijakan publik
- b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan

#### **b. Bagi Pemerintah Atau Lembaga Terkait**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi lembaga yang menjalankan dalam hal ini adalah Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung, agar mampu melaksanakan kebijakan lebih baik lagi

#### **c. Bagi Masyarakat**

Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat khususnya adalah orang-orang yang terlibat dilembaga ini agar tentang pelaksanaan kebijakan ini.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Anggara (2014:232), menjelaskan bahwa implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu, *to implemment to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk memberi dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Mazmanian dan Sebatler dikutip Widodo (2010:87), hakikat utama implementasi suatu kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau ditetapkan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

Implentasi menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65), yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat untuk kelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada tujuan yang sudah digariskan dalam bentuk keputusan kebijakan.

Setelah melihat beberapa definisi diatas yang di sampaikan oleh para ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi yaitu sebuah kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

Goerge C Edward III dalam Agustino (2008:149) mengajukan bentuk implementasi sebuah kebijakan yang kemudian dikenal dengan model *direct and indirect impac on implementation*. Menurut George C. Edwar III ada empat faktor yang sangat menentukan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi, yang meliputi: transmisi yang jelas, kejelasan komunikasi yang diterima dapat dimengerti dan tidak membingungkan, dan konsisten perintah yang telah diberikan dalam pelaksanaan komunikasi.
2. Sumber daya manusia, yang meliputi: staf yang kompeten dibidangnya, informasi yang jelas akan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Adanya wewenang yang diberikan kepada para pelaksana, dan fasilitas yang memadai dalam rangka implementasi kebijakan
3. Diposisi, yang meliputi: karakter pelaksana yang memiliki sikap jujur, serta pelaksana yang memiliki sikap komitmen terhadap tugas yang telah diterimanya serta memiliki karakter yang tegas dalam melakukan implementasi kebijakan.
4. Struktur birokrasi: birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memounya pengaruh yang besar terhadap implementasi sebuah kebijakan dan bagaimana kekuatan stuktur birokrasi tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan.

**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR 041 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA  
ADMINISTRASI SATUAN PRAMUKA



IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PETUNJUK  
PELAKSANA  
ADMINISTRASI SATUAN  
PRAMUKA DI  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN GUNUNG  
DJATI BANDUNG



**George C Edward III**  
Implementasi kebijakan  
merupakan pelaksana dari  
suatu program yang  
ditunjukkan untuk mencapai  
tujuan dari kebijakan

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengutarakan proporsi sebagai berikut “Implementasi Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka No 041 Tahun 1995 pada lembaga Pramuka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung” akan terselenggara dengan baik dan teratur apabila dilakukan berdasarkan pengukuran yang tepat untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III merujuk kepada *variable* komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

